



**KONSEP RESILIENSI DAN KETANGGUHAN DALAM
PERENCANAAN KEBIJAKAN SOSIAL**
**(Studi Evaluasi Berdasarkan Tren Kemiskinan di Masa Pandemi
Covid-19)**

Sri Sulistyaningsih¹ & Muhammad Ivan²

*¹Perencana Muda di Balai Anak Handayani, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
Kementerian Sosial RI
Cicie2naqiya@yahoo.com*

*²Analisis Kebijakan Ahli Muda di Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas
Pendidikan dan Moderasi Beragama RI
ivansky5981@gmail.com*

*Received: 2 November 2021; Revised: 10 November 2021; Accepted: 13 November 2021; Published: 15 November 2021; Available
online: November 2021.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan memberikan perspektif perencanaan kebijakan sosial dalam konsep resiliensi dan ketangguhan yang dapat mengefektifkan dan mengefisienkan berbagai program kebijakan sosial pemerintah yang lebih dinamis. Masa pandemi Covid-19 menjadi pelajaran besar bagi pemerintah untuk beradaptasi dengan mendayagunakan sumber daya yang ada agar program kebijakan sosial dapat terus berjalan. Namun resiliensi tidak cukup, pemerintah membutuhkan perencanaan kebijakan yang tangguh. Dengan jumlah angka kemiskinan yang terus meningkat signifikan di berbagai wilayah dan berbagai deviasi dari dinamika kemiskinan yang terjadi sebelum pandemi seperti meningkatnya jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan migrasi penduduk usia produktif ke perkotaan meninggalkan problem sosial ekonomi di daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hilirisasi program kebijakan sosial yang tangguh harus diselaraskan dengan layanan sosial dasar seperti pendidikan dan kesehatan dengan harapan masyarakat semakin produktif dan mandiri untuk mengantisipasi bencana lainnya terjadi di kemudian hari. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah

konsep resiliensi dan ketangguhan dalam perencanaan kebijakan sosial dapat memberikan umpan balik pada produktivitas dan kemandirian masyarakat.

Kata Kunci: Perencanaan Kebijakan Sosial, konsep resiliensi dan ketangguhan, kemiskinan, pandemi Covid-19

Abstract

This study aims to provide a social policy planning perspective in the concept of resilient and robustness that can make various government social policy programs become more effective and efficient. The Covid-19 pandemic period has become a big lesson for the government to rapidly adapt with severe condition by utilizing existing resources so that social policy programs can persist. But resilience is not enough, the government needs strong policy planning. With significantly increasing number of poverty rates in various regions and deviations from the dynamics of poverty that occurred before the pandemic, such as the increasing number of Indonesian Migrant Workers (TKI) and the migration of the productive age population to urban areas, it leaves socio-economic problems in the regions. This study uses a qualitative approach and uses the literature method. The results of the study indicate that the downstream of strong social policy programs must be aligned with basic social services such as education and health in the hope that the community will be more productive and independent to anticipate other disasters occurring in the future. The conclusion in this study is that the concepts of resilience and robustness in social policy planning can provide feedback on community productivity and independence.

Keywords: Social Policy Planning, the concept of resilience and robustness, poverty, the Covid-19 pandemic

PENDAHULUAN

Kemiskinan terus menjadi isu problematik dan kronis yang belum teratasi hingga dua dekade lebih reformasi. Kemiskinan menyebabkan masyarakat desa rela mengorbankan apa saja demi keselamatan hidup (James. C.Scott, 1981). Migrasi penduduk khususnya ke kota-kota di Jawa menurut Gavin Jones (dalam Dorodjatun, 1986) telah menambah jumlah penduduk miskin. Hal tersebut dapat terjadi karena dua hal yaitu: karena

penambahan secara alamiah (lebih banyak kelahiran dari pada kematian); dan karena adanya migrasi orang desa ke kota yang terus bertambah (untuk mencari pekerjaan).

Graeme Hugo (1986) yang memfokuskan migrasi sirkuler penduduk sekitaran Jakarta dengan massifnya perkembangan industri dan pembangunan infrastruktur kota menjadi daya tarik penduduk seperti Tangerang, Bogor, Depok dan Bekasi. Penguatan teori Graeme Hugo

yang dilakukan Lea Jellinek (1986), Jellinek menganalogikan 'pondok' sebagai sebuah rumah sederhana tempat menginap di pedesaan. Pondok juga menampung pendatang baru dari desa-desa yang sama, dan menyediakan lapangan kerja sehingga selalu menarik minat bagi berlangsungnya proses 'migran sirkuler'.

Perkotaan sebagai magnet bahkan dalam proyeksi BPS (2013) tren kependudukan sampai tahun 2035 di perkotaan akan semakin meningkat. Pembangunan sosial harus mampu membaca kondisi tersebut sebagai anomali yang semakin memperlambat pertumbuhan kawasan ekonomi khusus di daerah atau pulau besar lainnya. Hal ini akan menimbulkan kesenjangan karena di banyak daerah yang kurang maju lebih banyak lansia dan anak-anak, sementara penduduk usia produktif lebih memilih bekerja di perkotaan atau menjadi TKI.

Untuk itu, pembangunan sosial dalam beberapa hal mengacu pada berkurangnya kerentanan dan bebas dari kekerasan karena sebagian besar terkait dengan ketidaksetaraan (World Bank, 2020; Wilkinson, 2004). Kesenjangan berkaitan pula dengan hak asasi yang diterima warga sebagai refleksi dari berbagai kebijakan pembangunan

sosial (MacLachlan, 2002). Dalam masyarakat Barat berkembang anggapan bahwa perencanaan sosial senantiasa berkaitan erat dengan perencanaan kesejahteraan sosial (Conyers, 1992).

Dalam merancang perencanaan kebijakan sosial, Rawls (1967) mengidentifikasi dan merekomendasikan dengan ukuran yang diterima setiap orang hak yang sama untuk sistem total kebebasan dasar yang sama yang paling luas yang kompatibel dengan sistem kebebasan yang sama untuk semua. Klasifikasi ekuitas yang berguna diberikan oleh Fink (1998) yang mengidentifikasi dua kategori ekuitas: Keadilan horizontal dan Keadilan vertikal.

Tantangan ketidaksetaraan bersifat global, dan terkait erat dengan masalah mendesak lainnya di zaman kita: tidak hanya perubahan teknologi yang cepat, tetapi juga krisis iklim, urbanisasi, dan migrasi. Di banyak tempat, gelombang ketimpangan yang semakin besar dapat semakin membengkak di bawah kekuatan megatren ini (World Social Report, 2020).

Kondisi ketimpangan dapat tergambarkan dari jumlah pengangguran yang menurun sejak tahun 2006-2018. Tingkat

pengangguran nasional turun dari 10,3% pada 2006 menjadi 5,3% pada 2018. Namun, sekitar 30% pekerja setengah menganggur dan banyak pekerja menghadapi jam kerja yang panjang dan upah rendah (OECD, 2019). Pekerjaan informal tetap menjadi norma bagi sebagian besar pekerja, meskipun menurun: antara tahun 2006 dan 2016, tingkat pekerja informal (didefinisikan oleh Badan Pusat Statistik sebagai pekerja mandiri, pekerja tidak tetap atau pekerja lepas dan pekerja keluarga yang tidak dibayar) turun dari 68,9% menjadi 57,6%. OECD menyatakan bahwa ada korelasi yang erat antara informalitas dan kemiskinan berkorelasi.

Berbagai program bantuan social diluncurkan sebagai upaya pengentasan kemiskinan, di antaranya yang terbesar adalah Rastra, yang menyediakan beras bersubsidi bagi masyarakat miskin; Program Indonesia Pintar (PIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Program Raskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan hak dasar berupa kebutuhan pangan pokok. Sejak 2016, program Raskin mulai disosialisasikan dengan nama baru, yaitu Program Rastra. Dalam sejarahnya pada tahun 1998 dengan nama Operasi Pasar Khusus (OPK) dan tahun 2002 program OPK berubah menjadi program Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin). Hal yang berbeda

dari OPK yang awalnya untuk program darurat berubah menjadi bagian dari program perlindungan sosial.

Program PIP awalnya didasari oleh masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa yang melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP dan SMA, dimana APK untuk jenjang pendidikan SMP mencapai 90,12 persen, sementara APK untuk jenjang pendidikan SMA sebesar 80,89 persen untuk 2016 (BPS, 2017). Program ini merupakan kelanjutan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang dilaksanakan oleh Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 agar menteri, kepala lembaga negara, dan kepala pemerintah daerah untuk melaksanakan Program Keluarga Produktif melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Sehat (PIS), dan PIP.

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Indonesia sejak 2007 telah melaksanakan program bantuan langsung tunai bersyarat yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH, yang dalam istilah internasional dikenal dengan *Conditional Cash Transfers (CCT)*. Kemensos, khususnya

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga adalah koordinator dan pelaksana program PKH.

Berbagai program besar tadi merupakan program kebijakan sosial yang dapat mengantisipasi kegaduhan di masa pandemi yang sudah berlangsung selama dua tahun ini. Resiliensi menjadi penting dalam kondisi pandemi, sebagai kemampuan untuk kembali ke operasi normal selama periode waktu yang dapat diterima, pasca-gangguan. Namun, ketangguhan (*robustness*) adalah kemampuan untuk mempertahankan operasi selama krisis (Brandon-Jones et al. 2014). Membangun ketahanan membutuhkan strategi yang berbeda, jika dibandingkan dengan membangun ketangguhan, dan dalam hal distribusi pasokan medis utama (seperti masker wajah, ventilator, obat-obatan). Oleh karenanya, perencanaan kebijakan sosial yang tangguh lebih diperlukan daripada sekadar bertahan.

Dengan mengamati tren kemiskinan selama 20 tahun terakhir dan dengan membaca proyeksi penduduk di masa depan seharusnya perencanaan kebijakan sosial tidak cukup hanya untuk bertahan hidup, namun juga memberikan stabilitas kemandirian masyarakat yang tangguh.

STUDI LITERATUR **Perencanaan Kebijakan Sosial**

Perencanaan adalah proses mempersiapkan cetak biru tindakan untuk mencapai tujuan yang dinyatakan dalam kerangka waktu. Penetapan tujuan, spesifikasi sasaran, strategi mobilisasi sumber daya, alokasi pengeluaran untuk berbagai sektor pembangunan, cetak biru tindakan (termasuk operasionalisasinya dalam bentuk kebijakan, program dan sistem pelaksanaannya) adalah aspek-aspek yang memiliki untuk dipertimbangkan dalam setiap latihan perencanaan.

M. Webber (1973) mendefinisikan perencanaan sebagai proses pengambilan keputusan rasional tentang tujuan masa depan dan tindakan masa depan, yang bergantung pada penelusuran eksplisit dampak dan implikasi nilai yang terkait dengan tindakan alternatif dan pada gilirannya memerlukan evaluasi eksplisit dan pilihan di antara pencocokan alternatif. tujuan- set tindakan.

Alfred J. Kahn (1969) mendefinisikan perencanaan sebagai berikut: Perencanaan adalah pilihan kebijakan dan pemrograman berdasarkan fakta, proyeksi dan penerapan nilai-nilai. Semua ini dapat diringkas secara singkat sebagai; Perencanaan

adalah perumusan dan realisasi kebijakan melalui pilihan dan rasionalisasi.

Semua ini dapat diringkas secara singkat sebagai; Perencanaan adalah perumusan dan realisasi kebijakan melalui pilihan dan rasionalisasi. Perencanaan sangat penting karena memungkinkan kita untuk merumuskan dengan tepat apa yang ingin kita capai dalam kerangka waktu tertentu.

Perencanaan dalam pembangunan merupakan upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia baik individu maupun masyarakat. Kebijakan yang dirancang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat atau kualitas hidup masyarakat tersebut didefinisikan sebagai kebijakan sosial (Midgley and Livermore, 2009: x).

Pandangan Midgley tersebut diperkuat oleh pendapat Deacon (2002: 4-8) yang menyatakan bahwa kebijakan sosial sebagai suatu kajian dan analisis seringkali dipandang tidak memiliki hubungan yang erat dengan ilmu sosial lainnya seperti ilmu ekonomi, ilmu sosiologi, dan ilmu politik.

Ponsioen (1959) menempatkan perencanaan sosial sebagai perencanaan kebijakan. Dalam pandangan Ponsioen bahwa ada unsur-unsur penting bagi setiap proses pembangunan masyarakat: (1) tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar

seluruh penduduk; (2) proses tersebut membentang di atas wilayah tertentu dengan homogenitas populasi yang cukup; (3) proses tersebut bermaksud untuk mengintegrasikan wilayah yang sedang berkembang ke dalam kehidupan sosial, budaya dan ekonomi negara secara keseluruhan; (4) ini semua terjadi atas kerjasama prakarsa rakyat, sehingga rakyat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan.

Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan public. Menurut Bessant (2006:4) menyatakan bahwa *in short, social policy refers to what government do when they attempt to improve the quality of people's live by providing a range of income support, community services, and support programs.* Dengan kata lain, kebijakan sosial terselenggara untuk mengakomodir kepentingan individu/masyarakat yang bersifat public, yakni untuk menyelesaikan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat banyak dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup manusia melalui beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan, dan program tunjangan sosial lainnya.

Perencanaan kebijakan sosial berbasis nilai-nilai resiliensi masyarakat dalam menghadapi krisis atau setelah keluar dari krisis diharapkan dapat menciptakan ketangguhan kebijakan sosial. Kebijakan sosial sangat berkaitan

erat dengan masalah sosial dan pelayanan sosial. Kebijakan sosial hakikatnya merupakan respon terhadap masalah sosial yang dilakukan melalui pemberian berbagai program pelayanan sosial. Untuk membuat kebijakan sosial yang tangguh, kebijakan sosial memiliki fungsi preventif, kuratif, dan pengembangan. Ketiganya dibuat untuk memenuhi hak-hak sosial warganya.

Nilai-nilai Resiliensi dan Ketangguhan (*Robustness*)

Istilah 'ketahanan' berasal dari istilah Latin *resiliere* atau *resilio* untuk 'memantul' atau 'memantul' (Alexander 2013). Tindakan 'memantulkan kembali' atau kembali ke beberapa bentuk keseimbangan telah menjadi ciri pemahaman selanjutnya tentang ketahanan, khususnya dalam ekologi, teknik, dan manajemen bencana (Holling 1973; Manyena et al. 2011; Davoudi et al. 2012). Sementara definisi serupa ditemukan dalam teori organisasi, di mana 'ketangguhan' didefinisikan sebagai 'kapasitas organisasi untuk mempertahankan pola fundamentalnya pada karakteristik inti di bawah kondisi yang berubah' (van Oss dan van't Hek 2011, hlm. 34); dari perspektif ini, ketangguhan organisasi tidak harus dirancang, tetapi dapat

muncul dan dilembagakan melalui konfigurasi khusus rutinitas internal, budaya dan memori.

Resiliensi adalah konsep yang berfokus pada pemahaman kemampuan sistem, organisasi, kebijakan, dan individu untuk bertahan dari waktu ke waktu terhadap guncangan 'eksternal' (tanpa, bagaimanapun, mengidentifikasi alasan khusus atau penyebab kemampuan ini). Sementara, ketangguhan secara langsung menghubungkan dinamika sistemik /organisasi/kebijakan dengan penilaian kapasitas kinerja, yaitu kemampuan untuk mempertahankan kinerja yang sama dalam menghadapi segala jenis gangguan internal/eksternal (Bednar 2016, p. 169).

Program kebijakan sosial merupakan upaya menjaga keberlanjutan yang dapat menyelamatkan ketahanan sosial masyarakat. Stabilitas masyarakat akan terganggu apabila program tersebut tersendat dan tidak sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Masa pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung hampir dua tahun membutuhkan resiliensi sosial untuk bertahan dan kemudian bangkit kembali ke dalam kondisi normal. Sosiolog menempatkan terminologi "resiliensi (ketahanan)" tersebut

untuk menjelaskan kemampuan manusia untuk kembali ke keadaan normal setelah menyerap beberapa stres atau setelah bertahan beberapa perubahan negatif (Surjan, Sharma, Shaw, 2011: 17-18).

Murray & Zautra (2012) telah menggunakan konseptualisasi resiliensi yang lebih luas ini untuk mendefinisikan istilah tersebut sebagai respons adaptif terhadap kesulitan yang diungkapkan melalui proses-proses berikut: 1) pemulihan, 2) keberlanjutan, dan 3) pertumbuhan. Sementara itu, Bank Dunia (Benson et al, 2012, Arnold et al, 2014) mendefinisikan resiliensi sebagai kemampuan untuk bertahan, pulih dari, dan mengatur ulang dalam menanggapi krisis sehingga semua anggota masyarakat dapat mengembangkan atau mempertahankan kemampuan untuk berkembang.

Capano (2015) melebarkan perspektif desain kebijakan bahwa resiliensi harus lekat dengan ketangguhan kebijakan sosial agar masyarakat tetap dapat menjalankan kehidupannya secara efektif. Ketangguhan dan resiliensi menarik bagi peneliti yang tertarik untuk memahami perubahan dan stabilitas kebijakan karena mengacu pada kemampuan kebijakan untuk bertahan dari waktu ke waktu dengan mengatasi guncangan eksternal dan gangguan internal yang relevan.

Capano (2015) menambahkan bahwa faktanya, dalam tiga dekade terakhir, telah terjadi peningkatan minat dalam ketangguhan dan resiliensi di beberapa bidang kebijakan tertentu (perubahan iklim, kebijakan lingkungan, dan manajemen risiko) dan di antara para sarjana politik komparatif yang tertarik dengan desain kelembagaan (Shepsle 1989). ; Goodin 1998; Bednar 2009). Selanjutnya, salah satu kerangka kebijakan publik yang paling menonjol, kerangka Analisis dan Pengembangan Kelembagaan yang dikembangkan oleh Elinor Ostrom, mencurahkan banyak perhatian pada ketangguhan dan, kemudian, pada ketahanan (Ostrom 1990; Janssen et al. 2007).

Disrupsi hampir terjadi di semua sektor kehidupan yang membuat pembuat kebijakan mampu membuat perencanaan yang lebih baik dengan memperhitungkan situasi ketidakpastian dan kompleksitas. Kesadaran yang semakin besar akan pentingnya desain kebijakan yang dapat mengatasi atau meminimalkan dampak dari potensi guncangan dan ketidakpastian. Secara khusus, Anderies dan Janssen (2013) bahwa ada tantangan keterkaitan yang tidak pasti antara tindakan dan hasil kebijakan, ruang masalah kebijakan yang sangat kompleks dan tidak jelas yang mencakup berbagai elemen yang saling berinteraksi yang harus dihadapi perancang kebijakan.

Capano (2015) menambahkan bahwa dalam membuat rancangan kebijakan, peneliti dan pembuat kebijakan harus mengkaji sejauh mana ketangguhan menghasilkan kekakuan dan dengan demikian menjadi pembawa kerapuhan kebijakan prospektif. Peneliti dan pembuat kebijakan lebih baik fokus pada ketangguhan dalam desain kebijakan untuk meningkatkan perhatian untuk mengatasi ketidakpastian. Ketidakpastian menunjukkan arti yang berbeda dalam bidang kebijakan yang berbeda. Misalnya, faktor partisan dan ideologis berdampak pada masalah sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan imigrasi secara berbeda dari bidang teknis lainnya seperti lingkungan, perubahan iklim, dan teknologi. Hal-hal tersebut sudah banyak terjadi dalam konteks Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode literatur. Metode studi pustaka atau studi literatur adalah mengumpulkan informasi dari buku-buku dan referensi lainnya yang terkait dengan masalah dan tujuan riset. Berbagai buku, jurnal, dan literatur lain sebagai sumber data yang akan diolah dan dianalisis oleh peneliti. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan sumber

kepuustakaan untuk mendapatkan informasi/keterangan yang bersifat teoretis. Studi literatur juga membahas hasil-hasil penelitian yang relevan, kepuustakaan dan dokumen-dokumen terkait perencanaan kebijakan sosial, baik di tingkat nasional maupun daerah, tren kemiskinan sebelum dan pasca dua dekade reformasi, dan telaah literatur lebih lanjut terhadap konsep resiliensi dan ketangguhan dalam perencanaan kebijakan sosial, isu ketenagakerjaan, dan program kebijakan sosial di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

ILO Monitor 2nd edition pada April 2020 menguraikan beberapa hal penting menyangkut dampak Covid-19 terhadap kondisi ketenagakerjaan seluruh dunia. Salah satunya tentang dampak krisis khususnya di negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah, sektor-sektor yang terkena dampak besar umumnya memiliki proporsi pekerja informal yang tinggi dimana para pekerjanya tidak memiliki jaminan sosial, atau punya tetapi dalam keadaan minimal. Para pekerja ini kini berada dalam kondisi paling rentan diantara kelompok pekerja lainnya.

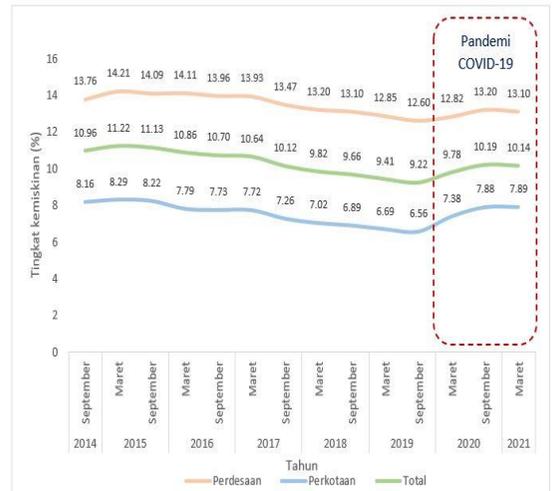
Lembaga keuangan dunia itu memproyeksikan angka kemiskinan Indonesia bisa mencapai 11,8 persen akibat pandemi Covid-19. Artinya, program PEN sepanjang 2020 diperkirakan mampu menyelamatkan lebih dari 5 juta orang menjadi miskin baru. Sepanjang tahun 2020, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 695,2 triliun untuk program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

Bukan hanya Indonesia, proses pembangunan di negara lainnya juga tidak berjalan dengan baik. Krisis kesehatan yang belum berhenti secara signifikan telah berdampak pada ekonomi dunia yang praktis membuat seluruh negara di dunia harus mundur dengan rencana-rencana strategis yang telah ditetapkan semula untuk kemudian digantikan kebijakan tanggap darurat dengan memobilisasi semua sumber daya untuk mengatasi wabah Covid-19 dan juga dengan berbagai program kebijakan sosial untuk menghindari masyarakat dari kemiskinan ekstrem.

Berdasarkan riset SMERU (2021) bahwa pada 15 Juli 2021, BPS merilis laporan pada Maret 2021 sebesar 10,14% atau sebanyak 27,54 juta penduduk Indonesia berstatus miskin. Tingkat kemiskinan Maret 2021 ini sedikit turun dari September 2020 namun masih lebih tinggi dibandingkan

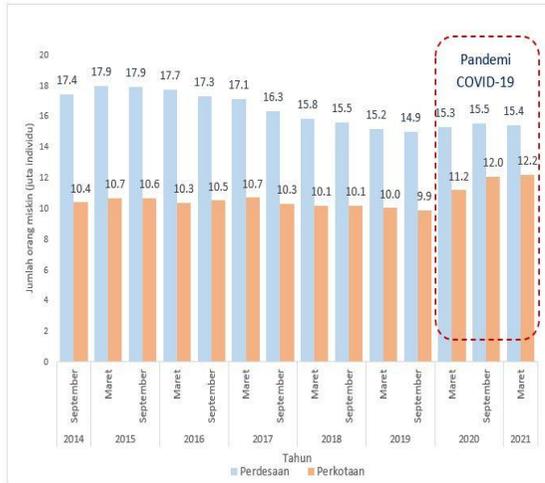
kondisi sebelum pandemi pada September 2019 (Gambar 1).

Figure 1: Tingkat Kemiskinan Nasional 2014-2021 (% populasi) (BPS, 2021)



Jika dilihat berdasarkan jumlah orang miskin, sejak September 2019 (kemiskinan terendah yang pernah dicapai Indonesia), jumlah orang miskin meningkat sebesar 1,12 juta individu dengan peningkatan terbesar terjadi di wilayah perkotaan sebesar 1 juta dan perdesaan sebesar 120 ribu orang (Gambar 2).

Figure 2: Jumlah Orang Miskin Indonesia 2014-2021 (juta orang) (BPS, 2021)



Selama tahun 2020 pemerintah telah menyalurkan sejumlah program perlindungan sosial baik subsidi maupun uang tunai atau bantuan sosial (bansos) sebagai bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hasil Survei Rumah Tangga 2020 melaporkan bahwa 85% rumah tangga sudah mendapatkan minimal satu program bantuan dari pemerintah. Sementara itu, 95% dari rumah tangga di persentil 20 ke bawah mendapatkan bantuan tersebut.

Empat program besar berupa bantuan tunai, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), BLT Dana Desa (BLT DD), dan Bantuan

Sosial Tunai (BST) dipakai untuk memudahkan penghitungan dalam mengukur kecukupan nilai program bantuan. Empat program tersebut dapat mengakomodir 35 juta atau 50% rumah tangga.

Di bidang ketenagakerjaan, lanskap pasar tenaga kerja pasca pandemik akan berubah (SMERU, 2021), yakni: tingkat penyerapan tenaga kerja tidak akan sebesar jumlah tenaga kerja yang ter-PHK, perusahaan hanya akan merekrut tenaga kerja yang memiliki produktivitas tinggi dan mampu berperan ganda, dan kemampuan di bidang teknologi sebagai kebutuhan baru. Dalam kaitan dengan program Kartu Pra Kerja, menurut APINDO (2021) bahwa Insentif kompetensi dan semi jaring pengaman sosial tersebut masih sangat terbatas untuk menjangkau pekerja terdampak Covid-19 karena sistem pendaftaran terbuka, dan saat ini yang paling dibutuhkan adalah program jaring pengaman sosial.

COVID-19 berdampak pada peningkatan jumlah penganggur akibat penambahan lapangan kerja sangat terbatas dan cenderung menyusut (Bappenas, 2021):

- a) Diperkirakan tahun 2020 penganggur akan bertambah 4,0-5,5 juta

orang dibandingkan dengan tahun 2019.

- b) Pada Tahun 2021 pengangguran diperkirakan mencapai 10,7-12,7 juta.
- c) Sektor yang paling banyak kehilangan pekerja adalah perdagangan, industri manufaktur, konstruksi, jasa perusahaan, dan akomodasi & makanan minuman.
- d) Dampak lainnya adalah penurunan upah dan jam kerja pada pekerja yang tidak ter-PHK.

Proyeksi Kependudukan dalam Perencanaan Kebijakan Sosial

Provinsi	Tahun					
	2010	2015	2020	2025	2030	2035
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11 Aceh	28,1	30,5	33,2	36,2	39,5	43,2
12 Sumatera Utara	49,2	52,6	56,3	60,1	64,1	68,1
13 Sumatera Barat	38,7	44,2	49,6	54,6	59,4	63,8
14 Riau	39,2	39,6	40,1	40,7	41,2	41,8
15 Jambi	30,7	32,0	33,3	34,8	36,5	38,2
16 Sumatera Selatan	35,8	36,5	37,3	38,2	39,1	40,1
17 Bengkulu	31,0	31,7	32,6	33,5	34,5	35,6
18 Lampung	25,7	28,3	31,3	34,6	38,3	42,4
19 Kep. Bangka Belitung	49,2	52,5	56,0	59,7	63,5	67,4
21 Kepulauan Riau	82,8	83,0	83,3	83,8	84,5	85,3
31 DKI Jakarta	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
32 Jawa Barat	65,7	72,9	78,7	83,1	86,6	89,3
33 Jawa Tengah	45,7	48,4	51,3	54,3	57,5	60,8
34 DI Yogyakarta	66,4	70,5	74,6	78,0	81,3	84,1
35 Jawa Timur	47,6	51,1	54,7	58,6	62,6	66,7
38 Banten	67,0	67,7	69,9	73,7	76,8	84,9
51 Bali	60,2	65,5	70,2	74,3	77,8	81,2
52 N T B	41,7	45,4	49,4	53,6	58,1	62,7
53 N T T	19,3	21,6	24,3	27,3	30,7	34,6
61 Kalimantan Barat	30,2	33,1	36,2	39,8	43,7	47,9
62 Kalimantan Tengah	33,5	36,6	40,2	44,1	48,3	52,9
63 Kalimantan Selatan	42,1	45,1	48,4	52,0	55,8	59,8
64 Kalimantan Timur	63,2	66,0	68,9	71,8	74,8	77,7
71 Sulawesi Utara	45,2	48,8	54,7	59,2	63,9	68,7
72 Sulawesi Tengah	24,3	27,2	30,5	34,2	38,4	43,1
73 Sulawesi Selatan	36,7	40,6	45,0	49,8	54,9	59,6
74 Sulawesi Tenggara	27,4	31,2	35,0	39,4	43,6	48,3
75 Gorontalo	34,0	39,0	44,0	48,9	53,5	58,4
76 Sulawesi Barat	22,9	22,9	23,0	23,0	23,1	23,1
81 Maluku	37,1	38,0	38,9	39,9	41,0	42,1
82 Maluku Utara	27,1	27,8	28,5	29,2	29,9	30,6
91 Papua Barat	29,9	32,3	34,9	37,8	40,9	44,4
94 Papua	26,0	28,4	31,2	34,2	37,7	41,5
Indonesia	49,8	53,3	56,7	60,0	63,4	66,6

Table 1 Persentase Penduduk Daerah Perkotaan menurut Provinsi, 2010-2035 (BPS, 2013)

Jika melihat proyeksi penduduk tahun 2035 berdasarkan Tabel 1 yang menyajikan tingkat urbanisasi per provinsi dari tahun 2010 sampai dengan 2035, maka pada tingkat nasional, tingkat urbanisasi diproyeksikan sudah mencapai 66,6 persen pada tahun 2035. Untuk beberapa provinsi, terutama provinsi di Jawa dan Bali, tingkat urbanisasinya sudah lebih tinggi dari Indonesia secara total. Tingkat urbanisasi di empat provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2035 sudah di atas 80 persen, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Banten.

Dengan memperhatikan tren proyeksi penduduk tersebut, maka perencanaan kebijakan sosial untuk menurunkan tingkat kemiskinan di daerah setidaknya perlu memperhatikan problem sosial ekonomi di daerah karena ketimpangan pembangunan. Misalkan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang meninggalkan anak dan pasangan (suami/istri) menimbulkan ketidakseimbangan dalam tumbuh kembang anak, jumlah perceraian yang menyebabkan banyak istri menjadi janda yang tidak bekerja berdampak pada meningkatnya jumlah Asisten Rumah Tangga (ART) di perkotaan atau menjadi TKW. Anak dititip orangtua/saudara atau tetangga untuk meningkatkan daya beli keluarga.

Pengiriman TKI dalam jumlah yang sangat banyak jelas

berdampak pada dinamika masyarakat di daerah yang ditinggalkan. Banyak penelitian melaporkan bahwa jumlah orang yang dikirim ke luar negeri (untuk menjadi TKI) dalam kurun waktu 20 tahun terakhir mengalami peningkatan (Perwira 2001; Tjiptoherijanto dan Sonny Harry Harmadi 2008; The World Bank 2008; Tirtosudarmo 2009). Jumlah TKI sampai tahun 2020 (BI dan BNP2TKI, 2020) mencapai 3,742,000 orang.

Schuerkens (2005: 535-537) migrasi intemasional lebih didominasi oleh adanya ketimpangan antara pembangunan ekonomi di kawasan/negara yang lebih maju dibandingkan dengan negara berkembang. Penelitian Nasution (2006) mencatat bahwa migran Indonesia mampu meningkatkan taraf hidup keluarganya dari pendapatan yang mereka peroleh selama bekerja di Malaysia. Salah satu dampak negatif dari profesi TKI ini seringkali menjadi penyebab utama perceraian, banyak TKI atau TKW yang bekerja di luar negeri pulang membawa pasangan baru.

Dengan potret pekerja migran produktif dan usia produktif yang bekerja di perkotaan meninggalkan pekerjaan rumah bagi pasangan maupun orangtua yang ditinggalkan dengan anak-anak yang masih usia dini, berusia

sekolah, dan remaja yang sebagian rentan mengalami problem sosial ekonomi dan masih membutuhkan perluasan program bantuan sosial.

Program tersebut berupa perluasan penerima dan manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako, Bantuan Sembako Jabodetabek, Bantuan Sembako Tunai, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Bantuan Beras PKH, Bantuan Tunai Penerima Kartu Sembako, Subsidi Gaji/Upah, Kartu Pra Kerja, Diskon Listrik, Subsidi Kuota Internet untuk mendukung Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Bantuan Subsidi Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan dan tenaga pendidik honorer dan yang terbaru adalah pemberian tabungan untuk anak Yatim, anak Piatu, anak Yatim Piatu yang orangtuanya meninggal akibat Covid-19

Resiliensi sebelum pandemi berhasil dilakukan dalam rangka menurunkan angka kemiskinan. Jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan menurut BPS sebesar 9,4 % (Maret 2019). Namun demikian sebagian besar penduduk lainnya masih menghadapi kerentanan terhadap berbagai risiko sepanjang siklus hidup. Dengan kata lain capaian program perlindungan sosial masih terkotak-kotak pada capaian

per-jenis program/kegiatan dan belum menunjukkan dampak berbagai jenis program secara komprehensif.

Program penanganan fakir miskin yang dilaksanakan selama ini relatif mampu menurunkan angka kemiskinan. Namun demikian hal ini bukan berarti telah mampu mendorong pengembangan skema program kehidupan berkelanjutan yang diarahkan pada upaya pemberdayaan masyarakat. Terlebih, mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih layak dan berkelanjutan, antara lain melalui peningkatan akses terhadap kegiatan ekonomi produktif, akses terhadap peningkatan keterampilan kewirausahaan, dan akses permodalan yang disertai dengan bimbingan dan pendampingan usaha serta pemasaran produk.

Resiliensi sudah berhasil dilakukan untuk bertahan namun belum memiliki ketangguhan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih mandiri. Dalam aspek regulasi, masih terdapat ketidakharmonisan antar regulasi kesejahteraan sosial sehingga menimbulkan kesalahpahaman, bahkan menghambat inovasi dalam pelayanan sosial. Di sisi lain, bantuan sosial belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan, baru sebatas pemenuhan kebutuhan dasar, dan belum memandirikan penerima manfaat, bahkan dapat

mengakibatkan ketergantungan penerima manfaat (Kemensos, 2020).

Situasi pandemi membuat kondisi dunia berubah sebelum waktunya, apalagi menghadap era VUCA: Berubah-ubah (Volatility), Ketidakpastian (Uncertainty), Kompleksitas (Complexity), Ambiguitas (Ambiguity) adalah situasi yang dibawa oleh globalisasi dan revolusi teknologi (U.S. Army Heritage and Education Center, 2018).

Teknologi, desentralisasi, kebangkitan aktor-aktor dari non-pemerintah dan faktor-faktor lain telah mempercepat kebangkitan VUCA di setiap domain. Resiliensi secara umum mengarah pada pola adaptasi positif selama atau sesudah menghadapi kesulitan atau resiko. Resiliensi adalah ide yang mengacu pada kapasitas sistem dinamis untuk bertahan atau pulih dari gangguan (Masten, 2007). Kondisi itu termasuk menyikapi kondisi VUCA. Ketangguhan menjadi lebih dibutuhkan apakah kebijakan sosial tetap dapat berjalan dalam kondisi yang terus berubah-ubah.

Tren kemiskinan sejak Maret 2015 sampai tahun 2021 dapat dikatakan belum menurun signifikan, meskipun menunjukkan pencapaian prevalensi kemiskinan angka satu digit 9,82% pada tahun 2018. Namun demikian, jumlah penduduk Indonesia yang

menderita kemiskinan masih cukup besar, mencapai 25,67 juta jiwa atau 9,66% dari jumlah penduduk pada September 2018.

Di masa pandemi, BPS (2021) mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia turun tipis sebanyak 0,04% dari 27,55 juta pada September 2020 menjadi 27,54 juta. Angka tersebut naik jika dibandingkan dengan Maret 2020 sebesar 4,2% dan hanya turun 0,05% dibandingkan dengan September 2020 yang sebesar 10,19%. Sementara jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya meningkat 0,36% dari 9,78%.

Dengan kondisi kemiskinan sepanjang 2015-2021 maka permasalahan utama dalam penanganan kemiskinan di Indonesia adalah persoalan mindset dalam menanggulangi kemiskinan. Prawoto (2009) menilai bahwa dalam konteks dimensi struktural atau politik, orang yang mengalami kemiskinan ekonomi biasanya juga mengalami kemiskinan struktural dan politis dan paradigma yang digunakan lebih bersifat karitatif daripada produktivitas. Artinya problem kemiskinan menjadi semakin kronis dan tidak pernah musnah dari generasi ke generasi.

Dari berbagai literatur, jumlah penduduk miskin di desa jauh

lebih besar dibandingkan dengan penduduk miskin di kota. Basis ekonomi desa umumnya pertanian, sehingga pengurangan kemiskinan pada rumah tangga pertanian dipercaya sebagai kunci mewujudkan penurunan angka kemiskinan nasional (Simatupang dan Dermorejo 2003; Suryahadi et al. 2006; Tarigan et al. 2019).

Perkembangan kemiskinan antarwilayah maupun antarsektor tidak sama akibat perbedaan faktor sumber daya, aksesibilitas terhadap teknologi informasi, kesempatan kerja, dan keterjangkauan program pembangunan yang berbeda (Tarigan et al. 2019; Todaro dan Smith 2006). Pandemi Covid-19 telah menyebabkan peningkatan persentase penduduk miskin pada sebagian besar provinsi di Indonesia. Data BPS menyebutkan bahwa pada Juni 2020, sekitar 22 dari 34 provinsi sudah terdampak (Herman 2020).

Pada periode September 2019 hingga mulai munculnya kasus-kasus Covid-19 di bulan Maret 2020 terdapat jumlah dan prevalensi kemiskinan meningkat secara nasional. Peningkatan jumlah penduduk miskin masing-masing 1,3 juta, 333 ribu, dan 1.630 ribu jiwa atau dengan peningkatan prevalensi 0,82% poin, 0,22% poin, dan 0,56% poin.

Besaran jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 meningkat 1,63 juta jiwa (9,78%) dari total 26,42 juta jiwa. Secara geografis, jumlah kemiskinan menguat di perkotaan dibandingkan di perdesaan. Potret disparitas kemiskinan antarwilayah perkotaan dan perdesaan masih cukup tinggi.

Pada bulan Maret 2020 tercatat lonjakan jumlah penduduk miskin secara nasional menjadi 26,42 juta jiwa, sebagian besar (13,3 juta) berada di Pulau Jawa. Data BPS menunjukkan jumlah penduduk miskin terkecil terdapat di Pulau Kalimantan, sebanyak 0,98 juta jiwa. Perkembangan kemiskinan provinsi berada di Pulau Maluku dan Papua (Maret 2018-September 2019, mencapai 20,98% dari total penduduk setempat, sedangkan di Pulau Jawa hanya 8,79%.

Sementara dari September 2019 sampai Maret 2020 tercatat kenaikan jumlah penduduk miskin sebanyak 1,5 juta jiwa. Jumlah terbesar terdapat di Pulau Jawa yang berubah status dari kategori rentan miskin menjadi miskin. Di antara enam provinsi di Pulau Jawa, Provinsi DKI Jakarta terkena dampak pandemi Covid-19 paling cepat dan besar yang mengakibatkan kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 1,11%, yakni dari 3,42% pada September 2019 menjadi 4,53% pada Maret 2020, atau sekitar 480,86 ribu jiwa setara dengan 4,53% dari total penduduk DKI Jakarta, meningkat

115 ribu atau 1,06% dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya.

Menurut data BPS (2020a), setelah DKI Jakarta, berturut-turut Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jambi, Kepulauan Riau, NTB, NTT, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua mengalami dampak pandemi Covid-19 cukup besar. Seluruh wilayah tersebut terdapat kenaikan jumlah penduduk miskin dengan perbedaan intensitas.

Konteks tersebut dalam istilah World Bank (2020a) sebagai penurunan pendapatan tenaga kerja dan nontenaga kerja. Pembatasan sosial telah mengubah perilaku masyarakat dalam berbagai kegiatan, seperti mengurangi pertemuan, pesta, perjalanan, dan memilih berbelanja secara daring/online. Akibatnya, penyewaan gedung, pemesanan catering, percetakan, pelayanan transportasi, dan lainnya menjadi kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan. Hasil survei BPS (2020b) melaporkan bahwa 62,60% responden yang bekerja di sektor transportasi dan pergudangan mengalami menurunnya pendapatan.

Konsekuensi logis penurunan pendapatan adalah menurunnya daya beli, terutama untuk

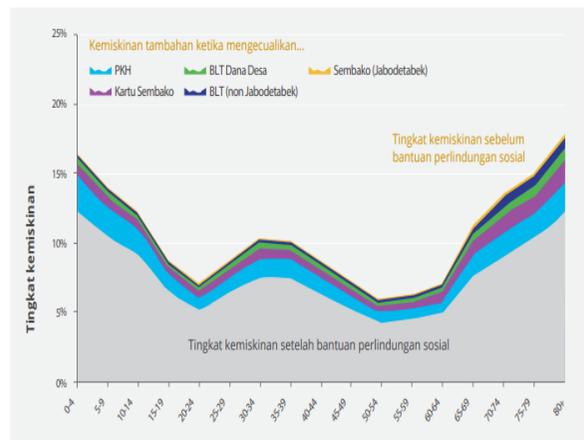
memenuhi kebutuhan bahan makanan dan nonmakanan. Bagi masyarakat miskin, sebagian besar pendapatan diperuntukkan untuk membeli pangan sehingga penurunan pendapatan berimplikasi terhadap penurunan pemenuhan pangan.

Hal ini masih ditambah oleh adanya peningkatan pengeluaran biaya pengobatan atau pembelian vitamin untuk menjaga atau mengobati resiko wabah Covid-19, perubahan sistem belajar siswa jarak jauh dengan daring telah secara otomatis menekan pengeluaran untuk konsumsi (World Bank 2020b).

Sejauh ini, pandemi Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, korban terinfeksi masih terus meningkat. Pemerintah mengeluarkan kebijakan tambahan anggaran sebesar Rp405,1 triliun dengan rincian: (1) untuk pemulihan ekonomi nasional Rp150 trilliun; (2) untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR Rp70,1 trilliun; (3) untuk perlindungan sosial Rp110 trilliun, dan (4) untuk bidang kesehatan Rp75 trilliun (Bappenas 2020)

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Keuangan, tercatat bahwa realisasi sementara program perlindungan sosial untuk rumah tangga mencapai

Rp220,39 triliun di sepanjang 2020, lebih tinggi dari alokasi awal (Rp203,9 triliun). Bantuan untuk rumah tangga diberikan dalam bentuk perluasan penerima dan manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako, Bantuan Sembako Jabodetabek, Bantuan Sembako Tunai, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Bantuan Beras PKH, serta pemberian Bantuan Tunai Penerima Kartu Sembako, Subsidi Gaji/Upah, Kartu Pra Kerja, Diskon Listrik, Subsidi Kuota Internet untuk mendukung Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Bantuan Subsidi Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan dan tenaga pendidik honorer.



Untuk melanjutkan upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19, pemerintah berencana untuk tetap memprioritaskan perlindungan

sosial untuk kelompok miskin dan rentan sebagai bentuk ketahanan ekonomi masyarakat pada program Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2021. Sebagai contoh, bantuan sembako pada tahun 2021 ditargetkan menysasar 18,8 juta KPM, dengan periode 12 bulan penyaluran, BST ditargetkan menysasar 10 juta kelompok penerima manfaat (PKM) untuk periode Januari hingga April, dan PKH akan diberikan diberikan kepada 10 ribu KPM PKH, serta BST sebesar Rp12 triliun. Pemerintah melalui Kementerian Sosial tengah berupaya untuk bekerjasama dengan perbankan terutama dari Himbara (Himpunan Bank Negara) serta PT Pis untuk menyalurkan bantuan agar lebih akuntabel dan mudah menjangkau masyarakat dengan efektif dan efisien. Harapannya, bantuan yang dialokasikan pada tahun 2021 ini akan dapat membantu masyarakat dalam kelompok miskin dan rentan untuk bertahan dari dampak pandemi COVID-19 serta membantu pemulihan kondisi perekonomian secara umum.

Kemiskinan tidak bersifat statis dan permanen, tetapi dinamis dan berkembang. Statistik agregat yang disajikan di atas tidak memperlihatkan mobilitas ekonomi, baik ke dalam dan ke luar dari kemiskinan dan antar kelas ekonomi. Pendapatan dan konsumsi rumah tangga dari satu periode ke periode lainnya dapat berubah-ubah karena peristiwa

demografis (seperti kelahiran, kematian, pernikahan, dan perceraian) atau peristiwa ekonomi, seperti kehilangan pekerjaan dan perubahan upah (UNICEF, 2017).

Penelitian sebelumnya berdasarkan survei panel (longitudinal) menunjukkan bahwa keluarga Indonesia mengalami mobilitas yang signifikan. Misalnya, meskipun angka kemiskinan resmi anak pada tahun 2016 adalah 13 persen, dua kali lipat dari jumlah anak tersebut (26 persen) pernah berada di bawah garis kemiskinan nasional setidaknya satu tahun selama periode lima tahun sebelumnya. Akibatnya, komposisi kelompok anak di setiap kelas ekonomi terus berubah karena sebagian keluarga beranjak naik ke atas garis kemiskinan, sementara sebagian lainnya turun kesejahteraanya hingga di bawah garis kemiskinan.

PKH memberikan dampak terbesar terhadap penurunan kemiskinan anak, terlebih terkait kriteria spesifik yang menysasar anak. Persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan nasional pada tahun 2020, sebelum dan sesudah menerima bantuan perlindungan sosial, berdasarkan kelompok umur.

Bukti tentang perlindungan sosial sangat kuat di beberapa area, dan lemah di area lain. Transfer tunai dipelajari dengan sangat baik dan

telah menghasilkan bukti komparatif yang ketat tentang apa yang berhasil. Asuransi sosial memiliki basis bukti yang cukup kuat. Intervensi pasar tenaga kerja kurang dipelajari, tetapi memiliki bukti yang kuat. Secara sektoral, ada bukti kuat tentang pengurangan kemiskinan, dan peningkatan akses kesehatan dan pendidikan anak-anak. Bukti terlemah adalah menunjukkan dampak pada hasil sosial, seperti pemberdayaan perempuan dan inklusi sosial; dan apakah perlindungan sosial meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Dengan demikian, bukti-bukti tersebut dikelompokkan di sekitar akses layanan yang terukur dan dampak pembangunan manusia, dengan lebih sedikit bukti tentang tujuan pembangunan sosial jangka panjang. Meskipun program perlindungan sosial seringkali memiliki pandangan jangka panjang, basis bukti tidak memiliki banyak studi longitudinal.

Secara keseluruhan, bukti menunjukkan bahwa perlindungan sosial memiliki efek positif pada kesehatan anak dan ibu; pendaftaran dan kehadiran pendidikan dasar dan menengah; dan pengurangan kemiskinan. Berkaitan dengan jaminan sosial yang sudah mumpuni dan sistem perencanaan kebijakan sosial yang tangguh menjadi bentuk

dukungan untuk membangun modal manusia yang produktif untuk mengurangi ketergantungan program yang karikatif. Hughes dan Irfan (2007) mengingatkan bahwa investasi modal manusia adalah penting, bukan hanya untuk pertumbuhan ekonomi, namun juga untuk pengurangan kemiskinan. Pendidikan meningkatkan stok modal manusia, yang pada gilirannya meningkatkan keterampilan, produktivitas tenaga kerja, dan upah.

Dalam kaitan perencanaan kebijakan sosial yang tangguh dapat beriringan dengan hilirisasi program pembangunan manusia yang berdampak pada semakin meningkatnya indeks pembangunan manusia.

Salah satu cara yang paling efektif dengan memperbaiki layanan sosial dasar termasuk kesehatan dan pendidikan yang secara signifikan memberikan pengaruh dalam pengurangan kemiskinan. Perencanaan kebijakan sosial yang tangguh membutuhkan umpan balik berupa produktivitas dan kemandirian masyarakat yang dapat mengantisipasi jika ada bencana pandemi lanjutan dan bencana yang tak diharapkan datang di kemudian hari.

KESIMPULAN

Kemiskinan masih merupakan persoalan yang kompleks dan kronis. Hampir di setiap pemerintahan di berbagai negara sedang membenahi kembali dengan berbagai kebijakan sosial yang dapat menyelamatkan hajat hidup orang banyak untuk menghindari jumlah lebih banyak orang masuk ke dalam kemiskinan.

Konsep resiliensi tidak cukup untuk membuat perencanaan kebijakan sosial, namun perlu konsep ketangguhan (robustness) untuk memastikan bahwa ketika bencana terjadi kembali, maka program pemerintah tetap dapat berjalan. Kondisi di masa pandemi ini menjadi akselerasi perencanaan kebijakan sosial yang perlu mendapat perhatian khusus yang secara tidak langsung berdampak pada kesiapan kebijakan sosial yang lebih mapan (tangguh) apabila ada bencana sebagaimana pandemi Covid-19 yang mengubah dan berdampak pada banyak sektor kehidupan. Hal itu dapat dimungkinkan apabila konsep resiliensi diperkuat konsep ketangguhan dalam perencanaan kebijakan sosial di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

_____. (2013). *Proyeksi Penduduk Indonesia. Indonesia Population Projection 2010-2035*. Jakarta: BPS

A Theory of Justice. By John Rawls. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. 1971

Bednar, J. (2016). Robust institutional design: What makes some institutions more adaptable and resilient to changes in their environment than others? In D. S. Wilson & A. Kirman (Eds.), *Complexity and evolution: A new synthesis for economic* (pp. 167-184). Cambridge, MA: MIT Press

Benson, C., M. Arnold, and A. de la Fuente. 2012. "Financial Innovations for Social and Climate Resilience." Unpublished framework paper, World Bank, Washington, DC.

Fink., (1985). *The Field of Social World*: London Sage Publication, Sage Publication India

Herman. 2020. 22 provinsi alami kenaikan angka kemiskinan akibat Covid-19 [Internet]. [diunduh 2020 Agu 31]. Tersedia dari: <https://www.beritasatu.com/jeanny-aipassa/ekonomi/656063/22-provinsi-alami-kenaikan-angka-kemiskinan-akibat-covid19>

Horst W. J. Rittel, & Webber, M. M. (1973). *Dilemmas in a General Theory of Planning*. Policy

- Sciences, 4(2), 155–169.
<http://www.jstor.org/stable/4531523>
- <https://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/files/23-BBRC-2020-IV-1-1-HLT.pdf>
- https://smeru.or.id/sites/default/files/events/covid19webinar20200710_smeru.pdf
- <https://smeru.or.id/id/content/situasi-kemiskinan-selama-pandemi>
- https://smeru.or.id/sites/default/files/events/covid19webinar20200710_apindo.pdf
- https://smeru.or.id/sites/default/files/events/covid19webinar20200710_bappenas.pdf
- <https://www.unicef.org/indonesia/media/8461/file/Dampak%20COVID-19%20terhadap%20kemiskinan%20dan%20mobilitas%20anak%20di%20Indonesia.pdf>
- <https://www.worldbank.org/en/topic/socialdevelopment/overview#1> (2020)
- Hugo, Graeme J., 1986. Migrasi Sirkuler, dalam Dorodjatun Kuntjoro Jakti, Kemiskinan di Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Jellinek, Lea. (1986). "Sistem Pondok dan Migrasi Sirkuler," dalam Dorodjatun Kuntjoro Jakti (ed.) Kemiskinan di Indonesia (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia)
- KAHN, A. J. (1969). Theory and Practice of Social Planning. Russell Sage Foundation. <http://www.jstor.org/stable/10.7758/9781610443234>
- Kuntjoro-Jakti, Dorodjatun. (1986). Kemiskinan di Indonesia. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- MacLachlan, M., Amin, M., Mannan, H., El Tayeb, S., Bedri, N., Swartz, L., ... McVeigh, J. (2012). Inclusion and human rights in health policies: Comparative and benchmarking analysis of 51 policies from Malawi, Sudan, South Africa and Namibia. PLoS One, 7(5), e35864.
- Masten, A. S. (2007). Resilience in developing systems: Progress and promise as the fourth waves rises. Development and Psychopathology. 19. 921- 930. doi: 10.1017/S0954579407000442
- Midgley, James and Michael Sherraden. (2009). Dalam James Midgley, Martin B.

- Tracy dan Michelle Livermore (ed), *The Handbook of Social Policy*. London: Sage.
- Murray, K., & Zautra, A. (2012). *Community Resilience: Fostering Recovery, Sustainability, and Growth*. In M. Ungar (Ed.), *The Social Ecology of Resilience. A Handbook of Theory and Practice* (pp. 337-345). New York: Springer Science+Business Media.
- Nasution dalam Muslan Abdurrahman, *Tenaga Kerja Indonesia yang Tidak Terampil terhadap Peraturan Perundang-Undangan tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (Sebuah proses Pendampingan di Tengah Hukum Modern)*. Disertasi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006
- Ponsioen, J. A. (1959). *Social Planning as an Instrument of Social Policy*. *International Review of Administrative Sciences*, 25(1), 51-56. <https://doi.org/10.1177/002085235902500107>
- Scott, James C. 1981. *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Diterjemahkan oleh Hasan Basari. Jakarta: LP3ES
- Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, 2020
- Surjan, A., Sharma, A., & Shaw, R. (2011). *Understanding urban resilience*. In R. Shaw, A. Sharma (Eds.), *Climate and disaster resilience in cities* (pp. 17-45). UK: Emerald Group Publishing Limited
- Tarigan H, Simatupang P, Wahyuni S, Maulana M. 2019. *Strategi penanggulangan kemiskinan di pertanian dan perdesaan*. Laporan Akhir Penelitian. Bogor (ID): Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
- Todaro MP, Smith SC. 2006. *Pembangunan ekonomi*. Jilid 2. Ed ke-9. Jakarta (ID): Penerbit Erlangga.
- UNICEF Indonesia, *Children in Indonesia: An analysis of poverty, mobility, and multidimensional deprivation*, Jakarta, UNICEF Indonesia, 2017.
- Wilkinson, R. (2004) 'Why is violence more common where inequality is greater?', *Annals of the New York Academy of Sciences*, Vol. 1036, No. 1, pp.1-12.
- World Social Report, 2020